www.rajaebookgratis.com

PEDOMAN UMUM

KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAERAH TAHUN 2009

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
JAKARTA, 2008

www.rajaebookgratis.com

KATA PENGANTAR

Pedoman Umum Kegiatan Perlindungan Perkebunan di Daerah untuk tahun 2009 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten.

Isi dan substansi pedoman ini hanya memuat garis besar setiap kegiatan, antara lain: tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten selanjutnya dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.

Semoga pedoman umum ini dapat memberi manfaat sebagai pedoman kerja para petugas sehingga kegiatan perlindungan perkebunan tahun 2009 yang dilaksanakan di daerah dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Jakarta, Desember 2008

Direktur Jenderal Perkebunan

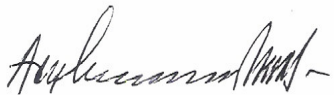

Achmad Mangga Barani
NIP 080 026 982

www.rajaebookgratis.com

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
I.	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN DAN SASARAN	3
	C. RUANG LINGKUP	3
	D. PENGERTIAN	3
II.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	6
	A. KEBIJAKAN	6
	B. STRATEGI	9
III.	KEGIATAN PERLINDUNGAN ERKEBUNAN	12
	A. PENGUATAN KELEMBAGAAN	12
	B. SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) PETANI PERKEBUNAN	22
	C. TANAMAN TAHUNAN	26
	D. PENANGGULANGAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN (PGUP)	55
IV.	ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN	93
	A. DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	93

www.rajaebookgratis.com

B. BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) 93
C. DINAS PROVINSI YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN 94
D. DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN 95
E. INSTANSI TERKAIT 95

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 96
A. MONITORING 96
B. EVALUASI 96
C. PELAPORAN 96

VI. PEMBIAYAAN 99

www.rajaebookgratis.com

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui kegiatan perlindungan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budidaya tanaman, baik di *on farm* maupun *off farm*. Perlindungan perkebunan berperan dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil atau produksi. Kegiatan perlindungan perkebunan erat kaitannya tidak hanya dengan gangguan organisme pengganggu tanaman [OPT], tetapi juga dengan gangguan non- OPT seperti anomali iklim [kebanjiran, kekeringan, kebakaran] dan gangguan usaha berupa penjarahan produksi dan lahan, yang kesemuanya mempengaruhi penurunan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah mengamanatkan implementasi PHT untuk perlindungan tanaman terhadap OPT. Melalui pendekatan ini diharapkan perlindungan perkebunan dapat menjadi asuransi [jaminan] bagi keberhasilan usaha perkebunan. Dalam penanganan gangguan OPT dipegang kebijaksanaan bahwa mencegah selalu menjadi pilihan terbaik. Karena itu pengamatan menjadi ujung tombak pelaksanaan perlindungan perkebunan yang harus dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan.

Perlu ditambahkan bahwa Undang-undang 12 tahun 1992 juga mengamanatkan tanggungjawab masyarakat dalam

www.rajaebookgratis.com

pelaksanaan perlindungan tanamannya. Dalam kaitan dengan PHT, pembinaan oleh pemerintah lebih terfokus pada pemberdayaan petani/pengusaha perkebunan agar tahu, mampu dan mau menerapkan secara mandiri. Dengan kebijaksanaan ini dapat diartikan bahwa petani/pengusaha perkebunanlah yang "paling" berkepentingan dengan masalah OPT dan gangguan lainnya. Mereka yang perlu memantau gejolak populasi OPT dan gangguan lain dipertanamannya, menganalisa tingkat kegawatannya serta memutuskan dan melaksanakan tindakan koreksi yang diperlukan.

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang penyediaan dan pengembangan teknologinya didukung oleh Badan Litbang, Puslit/Balit Komoditi, Perguruan Tinggi dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Implementasi penerapan PHT harus menjadi tanggung jawab petani pekebun dengan dibina oleh petugas perlindungan.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perlindungan perkebunan, menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang semula sudah tersusun, diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Perlindungan Perkebunan 2009 disusun guna memenuhi tujuan tersebut.

www.rajaebookgratis.com

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Memberikan acuan dalam pelaksanaan program, rencana kerja dan kegiatan perlindungan perkebunan tahun 2009.
Meningkatkan pemahaman para pelaksana di daerah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan perkebunan.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan perlindungan perkebunan.

2. Sasaran

Terlaksananya kegiatan perlindungaan perkebunan tahun 2009 sebagai implementasi dari program pembangunan perkebunan.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perlindungan perkebunan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Umum ini meliputi :

1. Tujuan dan Sasaran
2. Kebijakan dan Strategi Perlindungan Perkebunan
3. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan
4. Kegiatan Perlindungan Perkebunan Tahun 2009
5. Monitoring, Evaluasi da Pelaporan
6. Pembiayaan

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan :

www.rajaebookgratis.com

1. **Sistem budidaya tanaman** adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia lebih baik.
2. **Perlindungan perkebunan** adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan, dampak anomali iklim dan gangguan usaha lain.
3. **Organisme pengganggu tumbuhan [OPT]** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
4. **Perubahan Ikim** adalah meningkatnya gas rumah kaca di atmosfir akibat peningkatan emisi yang mengakibatkan terkekangnya energi matahari yang masuk ke bumi, sehingga nebyebabkan peningkatan suhu atmosfir bumi.
5. **Gangguan Usaha lainnya** adalah: menyangkut sengketa selain kasus tanah / lahan seperti: tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan, penetapan harga TBS sawit, menolak Pembangunan Perkebunan Sawit, Pengrusakan Tanaman, Penjarahan Produk, Pengrusakan Aset, dan lain-lain.
6. **Mitigasi** adalah upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot [penyerap] gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

www.rajaebookgratis.com

7. **Adaptasi** adalah merupakan tindakan-tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim.
8. **Pengendalian Hama Terpadu [PHT**] adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
9. **Eradikasi** adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
10. **Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu [SLPHT]** adalah salah satu metode penyuluhan atau suatu proses pendidikan non formal yang dirancang atas dasar pendekatan pendidikan untuk orang dewasa [andragogi], partisipatif, pendekatan dari bawah.
11. **Eksplosi** adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.
12. **Agens hayati** adalah agen pengendali hayati [serangga, jamur, bakteri atau binatang selain serangga] yang dapat digunakan untuk komponen pengendalian OPT.

www.rajaebookgratis.com

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menetapkan pembangunan perkebunan sebagai salah satu prioritas pembangunan pertanian, maka diperlukan berbagai terobosan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan perkebunan ke depan. Pembangunan perlindungan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan perkebunan harus menjabarkan secara operasional komitmen tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

A. KEBIJAKAN

1. Tanggung jawab Masyarakat dan Pemerintah

Perlindungan perkebunan menjadi tanggung jawab masyarakat [petani] dan pemerintah. Oleh karena itu kemandirian petani dalam mengambil keputusan pengelolaan OPT di lahan usaha taninya sangat penting. Dalam hal-hal tertentu [eksplosi] pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan yang ada.

2. Perlindungan Tanaman Dengan Sistem PHT

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman menggunakan sistem PHT. Sistem PHT bukan merupakan paket teknologi yang siap diterapkan di berbagai daerah secara seragam, tetapi mendorong dikembangkannya

www.rajaebookgratis.com

cara-cara pengendalian OPT spesifik lokasi sesuai dengan kondisi yang ada.

3. PHT Menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis

Sistem PHT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem budidaya tanaman serta pengamanan hasil dalam rangka pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdayasaing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi.

4. Penanggulangan Eksplosi OPT

Dalam keadaan normal, pengendalian OPT, pengamanan anomali iklim dan kebakaran menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani. Tetapi dalam keadaan eksplosi/wabah/luar biasa sehingga petani/kelompok tani tidak mampu mengendalikan, pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan; sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

5. Kewajiban Dalam Aspek Fasilitasi dan Motivasi

Aspek fasilitasi dan motivasi yang menjadi kewajiban pemerintah dalam perlindungan perkebunan antara lain informasi keberadaan dan perkembangan gangguan [OPT, kekeringan, kebanjiran, kebakaran, manusia], prakiraan yang akan datang, informasi dan penyediaan teknologi, sarana perlindungan tanaman dapat diperoleh petani dengan mudah, cukup, mutu baik, harga wajar, aman digunakan, serta bimbingan teknis dan aspek-aspek pelayanan yang lain.

www.rajaebookgratis.com

6. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Global

Penanggulangan dampak perubahan iklim global dapat dilakukan dengan cara :

a. Mitigasi

Upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot [penyerap] gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

b. Adaptasi

Merupakan tindakan-tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim.

7. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Pengendalian kebakaran lahan dan kebun dapat dilakukan dengan : Pencegahan, Pemadaman, Pengawasan, Penegakan Hukum, Sistem Peringatan Dini dan Kejasama regional dan internasional. Sesuai kebijakan nasional tugas Departemen Pertanian berperan dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.

8. Penanganan Gangguan Usaha Dengan Pembangunan Masyarakat [*Community Development*]

Pemecahan/penyelesaian gangguan usaha disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Penyelesaian konflik dilakukan dengan

www.rajaebookgratis.com

pendekatan *win-win solution*, dengan memperhatikan aspek hukum dan modal sosial setempat. Dalam hal terjadi tindak pidana maka penanggulangannya diserahkan kepada penegak hukum.

B. STRATEGI

Pembangunan perlindungan perkebunan perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai.

Strategi yang diterapkan dalam pembangunan perlindungan perkebunan pada dasarnya adalah penguatan atau pemantapan subsistem-subsistem dalm sistem perlindungan perkebunan, yang mencakup aspek :

1. Pengembangan dan Pemantapan SIM

Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh semua stakeholder baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Arus data dan informasi dari lapangan , kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat perlu dimantapkan dalam sistem informasi manajemen [SIM] perlindungan yang handal. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebarluasan data dan informasi perlu ditingkatkan menjadi lebih akurat, lengkap dan cepat.

2. Pemantapan pengamatan dan Peramalan,

Pengamatan diarahkan untuk mengetahui dengan cepat, lengkap dan akurat tentang apa jenis gangguan terhadap

www.rajaebookgratis.com

tanaman, dimana, dan kapan; yang mencakup intensitas, luas dan kerugian yang ditimbulkan serta perkembangannya. Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian dab tindakan lain yang diperlukan.

Peramalan diarahkan untuk memperkirakan perkembangan serangan OPT, perkembangan iklim dan dampak anomalinya, baik jangka peendek maupun jangka panjang, sehingga dapat diambil tindakan antisipatif yang tepat; dalam hal ini antara lain perlunya peringatan dini [early warning system].

3. Penyediaan Teknologi yang Tepat Guna dan Spesifik Lokasi

Teknologi perlindungan perkebunan yang spesifik lokasi dan dapat diterapkan oleh masyarakat dengan mudah, efektif, murah dan aman sangat diperlukan.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan

Sarana perlindungan tanaman baik untuk pencegahan, pengendalian maupun eradikasi [pestisida, alsin, agens hayati], perlu diusahakan memenuhi kriteria 6 [enam] tepat yaitu : tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat dan harga, sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah, efektif, murah dan aman.

5. Pemberdayaan SDM Perlindungan Perkebunan

SDM perlindungan tanaman adalah komponen yang paling strategis dan menentukan. Pemberdayaan SDM antara lain

www.rajaebookgratis.com

dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, kursus, penyuluhan, seminar/lokakarya, sekolah lapang dan apresiasi.

6. Pemantapan Gerakan Pengendalian

Gerakan pengendalian OPT, anomali iklim dan gangguan usaha di lapangan pada dasarnya tanggung jawab petani. Oleh karena itu pelaksanaan pengendalian di lapangan oleh petani baik secara individual maupun masal sangat penting ditingkatkan dan dimantapkan. Pemerintah memfasilitasi dan dapat memberikan bantuan dalam hal terjadi eksplosi/wabah/kejadian luar biasa.

7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka jajaran perlindungan perkebunan perlu meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas publik. Upaya peningkatan kualitas tersebut bertumpu pada upaya peningkatan kualitas SDM menuju profesionalisme, perangkat kerja baik piranti lunak dan piranti keras sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif dan memuaskan pihak yang membutuhkan pelayanan.

www.rajaebookgratis.com

III. KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN 2009

A. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Untuk mendukung kegiatan perlindungan perkebunan telah dibangun perangkat perlindungan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Perangkat ini terdiri dari 24 unit Laboratorium Lapangan (LL), 1 unit Laboratorium Analisa Pestisida (LAP), 1 unit Laboratorium Pengendalian Hama Vertebrata (LPHV), 6 unit Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), 18 Sub Laboratorium Hayati, 27 unit Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan 500 Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman (UPPT). Perangkat terserbut dilengkapi dengan peralatan dan tenaga-tenaga spesialis perlindungan tanaman perkebunan dengan kualifikasi S2, S1+, dan S01.

Pemberlakuan UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan keterbatasan anggaran pembangunan serta dan perbedaan kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah menyebabkan perangkat-perangkat tersebut tidak optimal.

Melihat kenyataan ini, dan mengingat bahwa sistem perlindungan perkebunan harus berjalan optimal dalam mendukung pembangunan perkebunan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan. Sehubungan dengan fungsinya

www.rajaebookgratis.com

sebagai motor penggerak berjalannya sistem perlindungan perkebunan, maka langkah pertama penguatan akan diarahkan pada kelembagaan perlindungan perkebunan, khususnya perangkat perlindungan perkebunan. Kegiatan-kegiatan dalam penguatan kelembagaan perlindungan tersebut mencakup :

1. Optimalisasi Laboratorium Lapangan (LL)

a. Metode

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan LL menggunakan/mengacu pada metode yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit/Perti dan/atau ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan/UPT Pusat (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan). Sedangkan untuk pelatihan penyegaran dilaksanakan mengikuti metode pendidikan orang dewasa (*andragogy*), meliputi pendalaman materi di kelas dan praktek lapangan.

b. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009, di 26 provinsi yaitu: NAD, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Babel, Banten, Jabar, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Papua dan Irjabar.

c. Pelaksanaan

Optimalisasi LL kegiatannya meliputi :

- Pengujian, pengembangan, teknologi pengendalian hayati.

www.rajaebookgratis.com

- Identifikasi dan inventarisasi OPT.
- Koleksi OPT, agens hayati dan pestisida nabati
- Rintisan metode pengamatan/surveilens OPT penting tanaman perkebunan.
- Pengembangan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- Penyebaran bahan informasi teknologi tepat guna.
- Pelatihan penyegaran petugas pengamatan OPT perkebunan.

d. Indikator Kinerja

Input

Dana, SDM, Data/informasi dan teknologi.

Output

- Tersedianya teknologi pengamatan dan pengendalian yang berbasis PHT.
- Terlatihnya petugas pengamat/petugas teknis perlindungan perkebunan.

Outcomes

- Terimplementasikannya teknologi pengamatan dan pengendalian yang berbasis PHT di lapangan.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengamat/petugas teknis perlindungan perkebunan.

Benefit

Tertanganinya permasalahan perlindungan perkebunan di lapangan.

Impact

Kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat diminimalkan.

www.rajaebookgratis.com

e. Komponen Biaya

Biaya untuk Optimalisasi LL terdiri dari : (a) insentif/honor bagi petugas LL; (b) Pengujian, pengembangan teknologi pengendalian hayati; (c) Identifikasi dan inventarisasi OPT; (d) Koleksi OPT, agens hayati dan pestisida nabati; (e) Rintisan metode pengamatan/ surveilens OPT penting tanaman perkebunan; (e) Pengembangan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT); (f) Penyebaran bahan informasi teknologi tepat guna; (g) Pelatihan penyegaran petugas pengamatan OPT perkebunan.

2. Optimalisasi Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)

a. Metode

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan LUPH menggunakan/mengacu pada metode yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit/Perti dan/atau ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan/UPT Pusat (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan).

b. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009, di 3 provinsi yaitu: Lampung, Sulawesi Utara dan Bali.

c. Pelaksanaan

Optimalisasi LUPH kegiatannya meliputi :

- Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami.
- Perbanyakan musuh alami.
- Pengembangan dan teknik penyebaran agens hayati.

www.rajaebookgratis.com

- Pengujian lapangan penggunaan musuh alami.
- Magang petugas LUPH ke Puslit/Balit.

d. Indikator Kinerja

Input

Dana, SDM, Data/informasi dan teknologi.

Output

- Tersedianya teknologi pengembangan dan penyebaran agens pengendali hayati.
- Terlatihnya petugas LUPH dalam bidang pengendalian hayati.

Outcomes

- Terimplementasikannya teknologi pengendalian OPT secara hayati.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas LUPH dalam bidang pengendalian hayati.

Benefit

Tertanganinya permasalahan perlindungan perkebunan di lapangan.

Impact

Kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat diminimalkan.

e. Komponen Biaya

Biaya Optimalisasi LUPH terdiri dari : (a) Insentif/honor bagi petugas LUPH; (b) Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami; (c) Perbanyakan musuh alami; (d) Pengembangan dan teknik

www.rajaebookgratis.com

penyebaran agens hayati; (e) Pengujian lapangan penggunaan musuh alami dan (f) Magang petugas LUPH ke Puslit/Balit.

3. Optimalisasi Sub Lab Hayati

a. Metode

Metode yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan Sub Lab Hayati pada metode yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit/Perti dan/atau ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan/UPT Pusat (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan).

b. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009, di 14 provinsi yaitu: Sumsel, Riau, Jambi, Babel, Lampung, Jateng, DIY, Bali, NTT, Kalteng, Sultra, Sulut, Irjabar, Papua.

c. Pelaksanaan

Optimalisasi Sub Lab Hayati kegiatannya meliputi :

- Uji adaptasi agens hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan
- Pengumpulan/pemeliharaan dan perbanyakan serta pemanfaatan agens hayati.
- Perbanyakan starter agen hayati.
- Perbanyakan musuh alami.
- Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan agens hayati.

www.rajaebookgratis.com

d. Indikator Kinerja

Input

Dana, SDM, Data/informasi dan teknologi.

Output

Tersedianya agens pengendali hayati untuk pengendalian OPT di lapangan.

Outcomes

Termanfaatkannya agens pengendali hayati untuk pengendalian OPT di lapangan.

Benefit

Tertanganinya permasalahan perlindungan perkebunan di lapangan.

Impact

Kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat diminimalkan.

e. Komponen Biaya

Biaya Optimalisasi Sub Lab Hayati terdiri dari : (a) Insentif/honor bagi petugas Sub Lab. Hayati; (b) Uji adaptasi agens hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan; (c) Pengumpulan/pemeliharaan dan perbanyakan dan pemanfaatan agens hayati; (d) Perbanyakan starter agens hayati; (e) Perbanyakan musuh alami dan (f) Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan agens hayati.

www.rajaebookgratis.com

4. Rehabilitasi gedung LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan UPPT

a. Metode

Metode yang digunakan dalam rehabilitasi gedung LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan UPPT menggunakan/mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan pengadaan peralatan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa (Keppres No. 80 Tahun 2003).

b. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009, sedangkan lokasinya adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi LL di laksanakan di 3 provinsi yaitu NAD, Sulut dan Sulteng.
- Rehabilitasi LUPH di laksanakan di provinsi Bali.
- Rehabilitasi Sub Lab Hayati dilaksanakan di 2 provinsi yaitu:Jambi dan NTT.
- Rehabilitasi UPPT dilaksanakan di 9 provinsi yaitu : Sumbar, Kep. Riau, NTB, Kalteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Papua dan Papua Barat.

c. Pelaksanaan

Rehabilitasi LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan UPPT kegiatannya terdiri dari :

- Rehabilitasi gedung

www.rajaebookgratis.com

- Pengadaan meubelair
- Pengadaan alat laboratorium.

d. Indikator Kinerja

Input

Dana, SDM, Data/informasi.

Output

- Terehabiltasinya LL (3 unit), LUPH (1 unit), Sub Lab Hayati (1 unit) dan UPPT (9 unit).
- Tersedianya peralatan laboratorium dan meubelair.

Outcomes

Teroptimalkannya kegiatan-kegiatan pada LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan dan UPPT.

Benefit

Tertanganinya permasalahan perlindungan perkebunan di lapangan.

Impact

Kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat diminimalkan.

e. Komponen Biaya

Biaya yang dialokasikan dalam kegiatan rehabilitasi gedung LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan UPPT terdiri dari : (a) biaya rehabilitasi gedung LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan UPPT ; (b) biaya pengadaan meubelair dan (c) biaya pengadaan alat laboratorium.

www.rajaebookgratis.com

5. Insentif Petugas Pengamat Hama dan Penyakit

a. Metode

Pemberian insentif dilakukan kepada petugas pengamat/UPPT setiap bulan pada saat penyerahan laporan hasil pengamatan, sekaligus dilakukan pembinaan oleh petugas provinsi tentang pelaksanaan pengamatan OPT perkebunan.

b. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2009, di 27 provinsi yaitu: NAD, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Babel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Papua dan Irjabar.

c. Pelaksanaan

Insentif Petugas Pengamat Hama dan Penyakit, meliputi :

- Pemberian insentif pada petugas pengamat
- Biaya operasional pengamatan OPT di lapangan
- Biaya administrasi pelaporan OPT

d. Indikator Kinerja

Input

Dana, SDM, Data, informasi dan teknologi.

Outpust

- Terfasilitasinya kegiatan pengamatan OPT di lapangan.
- Meningkatnya kinerja petugas pengamat/UPPT.

www.rajaebookgratis.com

Outcomes

Tersedianya laporan situasi OPT .

Benefit

Teramatinya OPT secara kontinyu dan berkesinambungan sehingga adanya perkembangan OPT dapat diketahui secara dini (*early warning system*) dan kemungkinan terjadinya eksplosi dapat diantisipasi.

Impact

Serangan OPT pada tanaman perkebunan berada dalam kondisi yang tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi.

e. Komponen Biaya

Biaya untuk Insentif Petugas Pengamat Hama dan Penyakit, terdiri dari: (a) biaya insentif bagi petugas pengamat/UPPT; (b) biaya perjalanan petugas pengamat ke lapangan dan (c) biaya pembelian ATK dan pengiriman laporan.

B SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) PETANI PERKEBUNAN

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) adalah salah satu metoda penyuluhan atau suatu proses pendidikan non formal yang dirancang atas dasar pendekatan androgogi (suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar) yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi serta pengertian kepada petani tentang manfaat PHT melalui proses belajar mengajar dengan metoda

www.rajaebookgratis.com

partisifasi aktif, mencari, menumbuhkan fakta sendiri, kemudian mengambil keputusan bersama untuk menentukan tindakan selanjutnya.

1. Metoda

- **Peserta:** adalah Kelompok Tani/Petani
- **Pemandu SL-PHT** adalah pemandu lapang yang telah mengikuti pendidikan khusus kepemanduan, yaitu Pemandu Lapang (PL) model SL-PHT eks Proyek PHT-PR
- **Materi:** adalah materi/pelajaran yang diberikan dalam pelaksanaan SL-PHT (Topik Umum, topik khusus, materi penunjang, dan dinamika kelompok tani dengan kegiatan utamanya adalah Anlisa Agroekosistem)
- **Metodologi pelatihan: metodologi pelatihan** yaitu segala teknik, cara penyajian, proses serta alat penunjang yang diterapkan dalam kegiatan SL-PHT.
- **Evaluasi SL-PHT**: Evaluasi penyelenggaraan SL-PHT dilakukan dengan beberapa model yang terdiri dari: test balot box, matrik analisa pasangan terperinci, dan matrik kualitas SL-PHT.

2. Waktu dan Lokasi

SL-PHT dilaksanakan pada tahun 2009 (Januari s/d Desember 2009.

Kegiatan SL-PHT berlokasi di 25 provinsi di 38 kabupaten.

www.rajaebookgratis.com

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan SL-PHT melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan perlindungan perkebunan dan dilaksanakan pada komoditi sesuai kebutuhan Provindi/Kabupaten/Kota. dan petani;

a. Pelaksana

Kegiatan SL-PHT dilaksanakan secara koordinasi oleh institusi terkait.

b. Persiapan

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan SL-PHT diawali dengan kegiatan-kegiatan persiapan yang meliputi:

- Identifikasi **wilayah/lokasi**;
- Survey calon petani peserta dan lokasi;
- Penyusunan rencana kegiatan;
- Workshop sosialisasi SL-PHT;
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

c. Koordinasi

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan SL-PHTt, Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan stakeholder.

d. Sarana Pelatihan

Sebagai sarana belajar dalam kegiatan SL-PHT adalah teknologi, kebun, bahn dan alat, petunjuk lapangan.

www.rajaebookgratis.com

e. Pengadaan bahan dan alat

Pengadaan bahan dan alat pelatihan dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Indikator Kinerja

Input

Input dalam pelaksanaan SL-PHT meliputi Dana, Sumber daya Manusia, Data petani, Bahan praktek, Saung pertemuan, Bahan dan Alat.

Outputs

Terlatihnya kelompok tani/petani sebanyak 91 kelompok tani/2.275 petani.

Out Comes

Tersedianya kelompok tani/petani yang mempunyai pengetahuan PHT**.**

Benefit

Petani mempunyai kemampuan, kemauan dan kesadaran menerapkan PHT di kebun sendiri.

Impact

Terkendalinya OPT di kebun petani sehingga terjadinya perbaikan produksi.

4. Komponen Biaya

Komponen biaya yang di perlukan untuk kegiatan SL-PHT adalah seperti berikut:

- Belanja Barang Operasional Lainnya
  - Konsumsi Peserta 91 kelompok 16 kali pertemuan
  - Adm, Surat, Foto Copy, dok, dll

www.rajaebookgratis.com

- Kompensasi kebun praktek
- Perlengkapan / peralatan praktek
- Sanitasi kebun dan pengendalian
- Penyusunan dan Pembahasan laporan

- **Belanja bahan**
  - Atk
  - Kertas Koran
  - Agens Hayati
  - Pupuk
  - Larutan EM
- **Belanja Jasa Lainnya**
  - Honor pelatih 16 kali pertemuan
- **Belanja Perjalanan Tetap**
  - Perjalanan lokal PL 16 kali pertemuan
  - Persiapan PL ke lokasi
- **Belanja perjalanan lainnya**
  - Sosialisasi, pembinaan dan monev dari Provinsi
  - Sosialiasi, Pembinaan dan Monev dari Kabupaten ke lokasi

C. TANAMAN TAHUNAN

1. Karet (*Hevea brasiliensis)*

Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (***Rigidoporus lignosus***) pada Tanaman Karet

a. Metode

Pengendalian penyakit JAP dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang

www.rajaebookgratis.com

dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu penyakit JAP karet dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Mekanis/Eradikasi
- Sanitasi kebun
- Biologis
- Kimiawi (aplikasi serbuk belerang)
- Penanaman tanaman antagonis (kunyit, lengkuas, dll.).

b. Waktu dan Lokasi

Pengendalian penyakit JAP karet dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009) di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara Provinsi Lampung.

c Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua takeholder, terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan perlindungan perkebunan.

1) Pelaksana

Pengendalian Penyakit JAP Karet dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). **Persiapan**

- Survey calon petani dan lokasi.

www.rajaebookgratis.com

- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian JAP Karet.
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

2) Koordinasi

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengendalian penyakit JAP, Tim Pengendalian melakukan koordinasi dengan stakeholder.

3) Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

4) Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian JAP dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator

Input

Input dalam pelaksanaan pengendalian penyakit JAP meliputi ana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

www.rajaebookgratis.com

Out puts

Terlaksananya pengendalian penyakit Jamur Akar Putih seluas 460 Ha dan terfasilitasinya petani sebanyak 460 orang.

Out Comes

Terkendalinya penyakit Jamur Akar Putih seluas 400 Ha, dan demplot pengendalian penyakit Jamur Akar Putih seluas 20 Ha.

Benefit

Menurunnya tingkat serangan penyakit Jamur Akar Putih pada tanaman karet.

Impact

Prodksi tanaman karet membaik.

e. Komponen Biaya

Komponen biaya yang diperlukan dalam pengendalian JAP adalah :

Biaya Pengendalian

- *Trichoderma* sp.
- Tanaman antagonis
- Belerang
- Bensin
- Oli
- Minyak tanah
- Gergaji mesin
- Aplikasi belerang, Trichoderma sp
- Tebang pohon, Memotong, membakar
- Penanaman tanaman antagonis
- Sanitasi kebun

www.rajaebookgratis.com

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Insentif petugas dinas (4 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (14 org, 4 kali)
  = Provinsi ke lokasi (4 org, 4 kali)

2. Kelapa (*Cocos nucivera*)

2.1. Pengendalian Hama *Sexava* sp

a. Metoda

Pengendalian hama *Sexava* sp dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu hama *Sexava* sp pada kelapa dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Sanitasi kebun
- Diversifikasi (tanaman sela)
- Biologis

b. Waktu dan Lokasi

- Pengendalian hama Sexava sp dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009)

www.rajaebookgratis.com

- Pengendalian *Sexava* sp. dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kep. Sangihe dan Kep. Talaud. Sedangkan di Propinsi Maluku Utara dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu: Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian hama *Sexava* sp dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian hama *Sexava* sp.
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian hama *Sexava* sp. di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

www.rajaebookgratis.com

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian *Sexava* sp dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian Hama Sexava sp. meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian Hama Sexava sp. seluas 1.820 Ha dan terfasilitasinya petani sebanyak 1.820 orang.

Out Comes:

Terkendalinya Hama Sexava sp. seluas 1.820 Ha.

Benefit:

Menurunnya tingkat serangan Hama Sexava sp. pada tanaman kelapa..

Impact:

Produksi tanaman kelapa membaik.

www.rajaebookgratis.com

e. Komponen Biaya

Komponen biaya yang diperlukan dalam pengendalian Hama ***Sexava* sp**. adalah :

Biaya Pengendalian

- Perbanyakan dan Penyebaran musuh alami
- Pengumpulan telur ***Sexava* sp**.yang terparasid -
- Leefmansia bicolor
- Sanitasi kebun
- Benih tanaman semusim untuk tanaman sela.
- Tabung reaksi
- Semprong
- Kain kasa
- Sprayer mini
- Madu
- Kurungan Serangga
- Koker
- Tabung bambu
- Pinset
- Kapas

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Insentif petugas dinas (4 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :

  = Kabupaten ke lokasi (14 org, 4 kali)

  = Provinsi ke lokasi (4 org, 4 kali)

www.rajaebookgratis.com

2.2. Pengendalian Hama *Brontispa longissima*

a. Metoda

Pengendalian hama *Brontisps* sp dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu hama *Brontispa* sp pada kelapa dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Mekanis (Pemotongan Janur)
- Biologis
- Sanitasi kebun

b. Waktu dan Lokasi

Pengendalian hama *Brontispa* sp. pada tanaman kelapa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009) di Kabupaten Poso, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Sabang Provinsi NAD.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian hama *Brontispa* sp dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani

www.rajaebookgratis.com

perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian hama *Brontispa* sp .
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian hama *Brontispa* sp. di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian *Brontisps* sp dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

www.rajaebookgratis.com

c. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian hama *Brontispa* sp. meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian Hama *Brontispa* sp.. seluas 900 Ha dan terfasilitasinya petani sebanyak 900 orang.

Out Comes:

Terkendalinya Hama Brontispa sp. seluas 900 Ha.

Benefit :

Menurunnya tingkat serangan Hama *Brontispa* sp. pada tanaman kelapa..

Impact:

Produksi tanaman kelapa membaik

e. Komponen Biaya

Komponen biaya yang diperlukan dalam pengendalian Hama *Brontispa* sp. adalah :

Biaya Pengendalian

- Pemotongan janur
- Penyebaran *Metarhizium* sp.
- Penyebaran *Tetrastichus* sp.
- *Metarhizium* sp.
- *Tetrastichus* sp.
- Tabung gelas
- Kuas
- Sprayer kecil
- Tambang plastik

www.rajaebookgratis.com

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Insentif petugas dinas (4 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (14 org, 4 kali)
  = Provinsi ke lokasi (4 org, 4 kali)

2.3. Pengendalian Hama *Oryctes rhinoceros*

a. Metoda

Pengendalian hama *Oryctes* sp dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu hama *Oryctes* sp pada kelapa dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Mekanis (pemerangkapan)
- Biologis
- Sanitasi kebun

b. Waktu dan Lokasi

- Pengendalian hama *Oryctes* sp dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009)

www.rajaebookgratis.com

- Lokasi pengendalian di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jember);

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian hama *Oryctes* sp dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian hama *Oryctes* sp .
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian hama *Oryctes* sp. di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit

www.rajaebookgratis.com

Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian *Oryctes* sp dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian hama ***Oryctes rhinoceros*** meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian Hama ***Oryctes rhinoceros.***.. seluas 400 Ha.

Out Comes:

Terkendalinya Hama ***Oryctes rhinoceros*** seluas 400 Ha.

Benefit:

Menurunnya tingkat serangan Hama ***Oryctes rhinoceros***. pada tanaman kelapa..

Impact:

Produksi tanaman kelapa membaik

www.rajaebookgratis.com

e. Komponen Biaya

Komponen biaya pengendalian hama ***Oryctes rhinoceros*** meliputi**:**

Biaya Pengendalian

- Metarhizium sp.
- Feromon
- Ember
- Penyebaran Metarhizium sp.
- Sanitasi kebun dan pekarangan
- Pemasangan Feromon
- Pengumpulan Oryctes sp. Dewasa

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Insentif petugas dinas (4 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (14 org, 4 kali)
  = Provinsi ke lokasi (4 org, 4 kali)

2.4. Pengendalian Penyakit Busuk Pucuk Kelapa (BPK) *Phytophthora palmivora*

a. Metoda

Pengendalian penyakit BPK dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas,

www.rajaebookgratis.com

persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu penyakit BPK dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Mekanis
- Sanitasi kebun
- Biologis
- Kimiawi

b. Waktu dan Lokasi

- Pengendalian penyakit Busuk Pucuk Kelapa dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009)
- Lokasi pengendalian penyakit Busuk Pucuk Kelapa adalah Kab. Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow dan Tomohon Provinsi Sulawesi Utara 4.904 hektar..

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian penyakit BPK dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

www.rajaebookgratis.com

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian penyakit BPK.
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit BPK. di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian penyakit BPK dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

www.rajaebookgratis.com

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian penyakit Busuk Pucuk Kelapa meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian penyakit Busuk Pucuk Kelapa seluas 4.904 Ha.

Out Comes:

Terkendalinya penyakit Busuk Pucuk Kelapa seluas 4.904 Ha.

Benefit:

Menurunnya tingkat serangan penyakit Busuk Pucuk Kelapa.

Impact:

Produksi tanaman kelapa membaik

e. Komponen Biaya

Komponen biaya pengendalian penyakit Busuk Pucuk Kelapa meliputi**:**

Biaya Pengendalian

- Metarhizium sp.
- Gergaji mesin (chain saw)
- Bensin
- Minyak tanah.
- Oli
- Tambang plastik
- Upah aplikasi Metarhizium sp

www.rajaebookgratis.com

- Upah sanitasi
- Upah tebang pohon

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Insentif petugas dinas (4 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (4 org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (12 org, 3 kali)
  = Provinsi ke lokasi (5 org, 2 kali)

2.5. Pengendalian Penyakit Layu Kalimantan *Phytoplasma*

a. Metoda

Pengendalian penyakit Layu Kalimanatan dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu penyakit Layu Kalimanatan dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Eradikasi
- Pemerangkapan serangga vektor
- Sanitasi kebun
- Penyulaman tanaman

www.rajaebookgratis.com

b. Waktu dan Lokasi

Pengendalian penyakit Layu Kalimantan pada tanaman kelapa dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009) :
Pengendalian Penyakit Layu Kalimantan pada Tanaman Kelapa dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian penyakit Layu Kalimantan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian penyakit Layu Kalimantan
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit Layu

www.rajaebookgratis.com

Kalimantan di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian penyakit Layu Kalimantan dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian penyakit Layu Kalimantan pada tanaman kelapa meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian penyakit Layu Kalimantan seluas 100 Ha.

Out Comes:

Terkendalinya penyakit Layu Kalimantan seluas 100 Ha.

www.rajaebookgratis.com

Benefit:

Menurunnya tingkat serangan penyakit Layu Kalimantan pada tanaman kelapa.

Impact:

Produksi tanaman membaik..

e. Komponen Biaya

Komponen biaya pengendalian Penyakit Layu Kalimantan meliputi **:**

Biaya Pengendalian

- Bibit Kelapa
- Gergaji mesin (chain saw)
- Bensin
- Minyak tanah.
- Oli
- Tebang pohon
- Sanitasi kebun

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (2 org, 5 bln)
- Insentif petugas dinas (2 org, 5 bln)
- Transport petugas lapang (2org, 5 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (12 org, 3 kali)
  = Provinsi ke lokasi (5 org, 2 kali)

www.rajaebookgratis.com

3. Jambu mete (*Anacardium occidentale*)

3.1. Pengendalian Hama *Helopeltis* sp

a. Metoda

Pengendalian hama *Helopeltis* sp dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu *Helopeltis* sp dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Pemangkasan
- Pemupukan
- Sanitasi kebun
- Biologis

b. Waktu dan Lokasi

- Pengendalian hama *Helopeltis* sp dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009)
- Lokasi pengendalian hama *Helopeltis sp* di Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

www.rajaebookgratis.com

1). Pelaksana

Pengendalian hama *Helopeltis sp* dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian hama *Helopeltis* sp .
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian hama *Helopeltis* sp. di lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian *Helopeltis* sp dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan

www.rajaebookgratis.com

(Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian hama *Helopeltis sp*. pada tanaman Jambu Mete meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Out puts :

Terlaksananya pengendalian hama *Helopeltis sp*. seluas 250 Ha.

Out Comes:

Terkendalinya hama *Helopeltis sp*. seluas 250 Ha.

Benefit :

Menurunnya tingkat serangan hama *Helopeltis sp*. pada tanaman Jambu Mete.

Impact:

Produksi Jambu mete membaik

e. Komponen Biaya

Komponen biaya pengendalian hama *Helopeltis sp* meliputi**:**

Biaya Pengendalian

- Beauveria sp.
- Pupuk PMLT
- Aplikasi Beauveria sp.
- Pemangkasan
- Sanitasi kebun

www.rajaebookgratis.com

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (2 org, 6 bl)
- Insentif petugas dinas (2 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (2org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (5 org, 4 kali)
  = Provinsi ke lokasi (2 org, 2 kali)

3.2. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Coklat *Phellinus noxius*

a. Metoda

Pengendalian penyakit JAC dilaksanakan dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai dengan pengamatan awal, meliputi luas, persentase dan tingkat serangan. Pengendalian terpadu penyakit JAC dilaksanakan secara serentak dan massal dengan cara :

- Penjarangan tanaman
- Eradikasi
- Pemangkasan tanaman
- Biologis
- Menanam tanaman antagonis

www.rajaebookgratis.com

b. Waktu dan Lokasi

- Pengendalian Penyakit Jamuar Akar Coklat pada Tanaman Jambu mete dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 (Januari s/d Desember 2009)
- Lokasi pelaksanaan pengendalian penyakit Jamur Akar Coklat pada Jambu mete dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Dompu.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian dengan melibatkan semua stakeholder terutama petani yang didampingi oleh petugas lapangan Perlindungan Perkebunan.

1). Pelaksana

Pengendalian penyakit JAC dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan) dan Kelomok Tani/petani.

2). Persiapan

- Survey calon petani dan lokasi.
- Penetapan petani dan lokasi berdasarkan hasil survey CP/CL.
- Workshop/Sosialisasi kegiatan Pengendalian penyakit JAC
- Pertemuan/Koordinasi dan konsultasi

3). Koordinasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit JAC. di

www.rajaebookgratis.com

lapangan antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan tingkat lapangan**.**

4). Sarana Pengendalian

Sarana pengendalian yang digunakan mencakup teknologi yang telah direkomendasikan oleh Puslit/Balit Perkebunan dan atau telah disusun menjadi Petunjuk Teknis.

5). Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat pengendalian penyakit JAC dilaksanakan oleh Satker Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota/ yang menangani perkebunan (Perlindungan Perkebunan)/ Kelompok Tani sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. Indikator Kinerja

Input :

Input dalam pelaksanaan pengendalian penyakit Jamur Akar Coklat. pada tanaman Jambu Mete meliputi Dana, Sumber Daya Manusia, Data Petani, Bahan dan Alat.

Outputs :

Terlaksananya pengendalian penyakit Jamur Akar Coklat.. seluas 100 Ha.

Out Comes

Terkendalinya penyakit Jamur Akar Coklat.. seluas 100 Ha.

www.rajaebookgratis.com

Benefit

Menurunnya tingkat serangan penyakit Jamur Akar Coklat. pada tanaman Jambu Mete.

Impact:

Produksi Jambu mete membaik..

e. Komponen Biaya

Komponen biaya pengendalian Penyakit Jamur Akar Coklat pada tanaman Jambu mete **:**

Biaya Pengendalian

- Biotriba sp.
- Trichoderma sp.
- Tanaman sela (padi gogo, kacang tanah)
- Gergaji mesin
- Bensin
- Oli
- Minyak tanah
- Aplikasi Biotriba dan Trichoderma sp.
- Pemangkasan pon
- Penanaman tanaman sela

Biaya Operasional

- Adm, dok, laporan, foto copy dll
- Sosialisasi dan pelatihan petani
- Insentif petugas lapang (2 org, 8 bl)
- Insentif petugas dinas (2 org, 8 bln)
- Transport petugas lapang (2org, 8 bln)
- Pembinaan Supervisi Monev :
  = Kabupaten ke lokasi (5 org, 4 kali)
  = Provinsi ke lokasi (2 org, 2 kali)

www.rajaebookgratis.com

D. PENANGGULANGAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN

1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran dan Perubahan iklim (Provinsi)

Kebakaran lahan dan kebun hampir terjadi setiap tahun dan menimbulkan dampak negatif terhadap asfek sosial, ekonomis dan ekologis, kebakaran terjadi antara lain disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan. Begitu juga dengan adanya perubahan iklim global antara lain menyebabkan pola iklim yang tidak teratur dan sulit di prediksi sehingga dapat berdampak negatip terhadap pola pengembangan perkebunan.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran dan upaya memantau dan mengatasi dampak dari perubahan iklim.
Tujuan kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran dan perubahan iklim adalah: (1) memantau kebakaran lahan dan kebun yang dilakukan lebih dini (Early Warning) dan melakukan ground chek ke lokasi/lapangan. (2) Pembinaan kepada para pekebun (rakyat dan perusahaan) dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. (3) memantau dampak perubahan iklim serta mencari solusi untuk mengatasinya.

a. Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan metode :

- Inventarisasi data dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi di lapangan,

www.rajaebookgratis.com

pemantauan melalui internet dan media elektronik lainnya, media cetak serta menghubungi instansi terkait.
- Pengecekan langsung ke lapangan (ground chek) jika terjadi kebakaran atau kejadian lainnya yang terkait dengan gangguan usaha perkebunan.
- Kunjungan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat/ petani dan perusahaan perkebunan.
- Koordinasi dengan insatansi/pihak terkait antara lain melalui forum rapat, seminar dan workshop.

b. Waktu dan Lokasi
- Kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran dan perubahan iklim dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009.
- Lokasi kegiatan diprioritaskan di daerah-daerah rawan kebakaran lahan dan kebun serta rawan gangguan karena pengaruh iklim (kekeringan, banjir dan longsor) di lahan perkebunan.

c. Pelaksanaan
- **Pemantauan Kebakaran Ladan dan Kebun**

Kegiatan dilaksankan oleh dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten yang terdiri dari : monitoring data/informasi, ground chek lapangan, menghitung luas areal yang terbakar serta koordinasi dengan Instansi terkait dan pelaporan :

- **Monitoring Data/Informasi**

Kegiatan monitoring data hot spot bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun yang terjadi yang dapat dilakukan dengan mengakses data dari internet melalui situs yang menyajikan data dan informasi kebakaran yaitu :

- **Situs** : **http://edwsfpmp2.hp.infoseek.co.jp/eswsds/menu/eindex. htm.** Sumber data Satelit NOAA-AVHRR dengan cakupan Sumatera, Kalimantan dan Malaysia. FFPMP-2 mengembangkan sistem distribusi data hotspot melalui mailing list(milis) si pongi. Data hotspot dikirim setiap hari melalui milis dan secara otomatis diterima semua anggota melalui e-mail. Untuk menjadi anggota list milis, harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke mailing list melalui alamat sipongi di **www.yahoo.com**
- ASEAN Specialized Metereological Centere (ASMC) pada situs : **http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/article.asp?pid=167.** Sumber data : Satelit NOAA.AVHRR dengan cakupan Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. ASMC mengirimkan data koordinat harian melalui e-mail kepada beberapa pengguna di Indonesia secara tgerbatas. Data yang berasal dari ASMC sering digunakan di tingkat regional ASEAN dan khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapedalda Provinsi.
- LAPAN

  Melalui Situs : **http//www.lapanrs.com/smba/smba.php**

  Sumber data : Satelit NOAA-AVHRR cakupan Sumatera

www.rajaebookgratis.com

dan Kalimantan atau Modis cakupan Indonesia dengan LAPAN melalui simba-nya mengembangkan sistem mitigasi bencana alam yang memberikan informasi pendeteksian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan hotspot harian dan bulanan serta informasi bencana alam lainnya.

- **Ground Chek**

Ground chek ini dilakukan apabila telah diketahui bahwa terdapat hotspot di daerah atau di wilayah binaan Kabupaten guna mengecek kebenaran hotspot yang ada dengan keberadaan dilapangan, apakah itu sudah terjadi fire spot atau belum dimana data hotspot itu didapat dari hasil monitoring melalui akses data dari internet.

- **Luas Areal yang terbakar**

Apabila kebakaran telah terjadi dilapangan dan benar terdapat diareal perkebunan atau diareal lahan pengembangan perkebunan, maka segera dibuatkan berita acara kebakaran, kemudian diukur berapa luasan areal yang terbakar.

- **Koordinasi**

Dalam melakukan kegiatan tersebut diatas perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait antara Dinas Provinsi, Pusdalkarhutla, Bapedalda, Manggala Agni, Satkorlak, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan dalam rangka menggalang kerjasama yang erat dengan instansi terkait, koordinasi mutlak dilakukan baik secara horisontal maupun secara vertical.

www.rajaebookgratis.com

Setelah semua alur dilalui maka dibuat laporan ke Gubernur dengan tembusan dikirimkan ke Bupati dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

- **Pelaporan**

Laporan terdiri dari 2 bentuk yaitu ;

- Laporan perkembangan kebakaran (hotspot) secara berkala (harian, mingguan dan bulanan), jika terjadi hotspot disuatu lokasi segera menyampaikan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota melalui telpon atau faximile untuk segera ditindaklanjuti. Laporan mingguan dan bulanan disampaikan ke Direktorat Jenderal perkebunan melalui faximile.
- Laporan Fasilitasi Pemantauan Kebakaran secara keseluruhan dan laporan pemantauan iklim disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

- Pembinaan Kepada Pekebun dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Pembinaan Kepada Pekebun dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Dilaksankan terhadap perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan yamg dilaksanakan antara lain melalui :
  - Penyuluhan dan sosialisasi Undang – Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan peraturan serta perundang-undangan lainnya yang menyangkut pelarangan pembakaran serta sosialisasi teknik pembukaan lahan tanpa bakar.

www.rajaebookgratis.com

- Pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dalam pengendalian kebakaran terutama dalam penyediaan sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

- **Pemantauan Iklim dan Bencana Alam.** Selain informasi hotspot/kebakaran, informasi iklim dan bencana alam lainnya seperti kekeringan, banjir dan longsor juga agar dapat dipantau dari situs BMG, LAPAN dan situs lainnya yang selanjutnya dapat dilakukan pengecekan ke lapangan. Selanjutnya dibuat laporan yaitu :
  - Prosedur Pemantauan Iklim dan bencana Alam
    Prosedur Pemantauan Iklim dan bencana Alam adalah sebagai berikut :
    - Mengakses internet atau memantau data dan informasi melalui media elektronik lainnya serta sumber lainnya secara dini.
    - Jika bencana alam tersebut cukup banyak maka segera dilakukan ground chek/inventarisasi dilapangan .
    - Penghitungan luas areal yang terkena bencana kekeringan, banjir dan longsor dengan menggunakan GPS.

www.rajaebookgratis.com

- Melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Gubernur dan tembusan kepada Bupati dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Laporan pemantauan iklim disuatu lokasi segera menyampaikan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota untuk segera ditindaklanjuti.
- Laporan Fasilitasi Pemantauan Iklim dan Bencana Alam secara keseluruhan bersama Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun tahunan disampaiakan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

d. Indikator Kinerja

Secara umum indikator kinerja dari kegiatan fasilitasi Pemantauan Kebakaran dan Perubahan Iklim adalah :

- ***Inputs***
  Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), peraturan dan informasi.
- ***Outputs***
  Terlaksananya pemantauan kebakaran lahan dan kebun serta iklim dan dampaknya pada usaha perkebunan.
- ***Outcomes***
  Diperolehnya data dan informasi kebakaran lahan dan kebun serta perubahan iklim dan dampaknya pada usaha perkebunan serta solusinya.
- ***Benefit***
  Diperolehnya solusi dalam mengatasi kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim dan atau bencana alam pada usaha perkebunan

www.rajaebookgratis.com

- ***Impacts***

  Menurunnya jumlah hotspot/luas areal kebun yang terbakar dan produktivitas tanaman perkebunan tidak tergangu karena perubahan iklim dan atau bencana alam.

e. Komponen Biaya

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Penyusunan dan Pembahasan Laporan
- Adm, Pengiriman Surat, Foto-Copy dll
- Penggandaan Laporan
- Biaya pulsa Telp, Fax, Internet

Belanja Bahan

- ATK dan Bahan Komputer

Belanja Perjalanan Lainnya

- Dalam rangka Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan.Iklim ke kabupaten
- Koordinasi ke Pusat

Belanja Modal *)

**) Khusus Prov/Kab yang belum disediakan*

- Pengadaan Komputer dan Peralatannya

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Penyusunan dan Pembahasan Laporan
- Adm, Pengiriman Surat, Foto-Copy dll
- Penggandaan Laporan
- Biaya pulsa Telp, Fax, Internet

Belanja Bahan

- ATK dan Bahan Komputer

Belanja Perjalanan Lainnya

- Dalam rangka Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim

www.rajaebookgratis.com

- Koordinasi ke Propinsi
- Koordinasi ke Pusat

Belanja Modal *)

**) Khusus Prov/Kab yang belum disediakan*

- Pengadaan Komputer dan Peralatannya

2. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun serta Dampak Perubahan Iklim

Tahun 2008 masih terjadi kebakaran lahan dan kebun di Indonesia yaitu berdasarkan pemantauan hotspot NOAA 16 dan NOAA 18 terjadi hotspot terutama di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia ketika bertindak selaku Inspektur Upacara dalam Apel Siaga Api pada bulan April di Palembang, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk "STOP EKSPOR ASAP".

Memperhatikan amanat dan instruksi Presiden tersebut, maka pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadi tanggung jawab semua pihak, oleh karena itu diperlukan koordinasi secara terus menerus diantara Instansi Terkait dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian / Perkebunan. Untuk itu diperlukan fasilitasi guna penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun pada provinsi rawan kebakaran.

Tujuan penyelenggaraan "Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim" adalah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah antar

www.rajaebookgratis.com

Instansi terkait dalam : (1) upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. (2) upaya mengatasi dampak perubahan iklim pada usaha perkebunan (3) mengukur seberapa jauh kekuatan di lapangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran seperti peralatan dan kesiapsiagaan perusahaan dan institusi terkait lainnya.

a. Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pertemuan koordinasi diantara pihak yang terkait dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran serta pihak terkait dalam mengatasi dampak perubahan iklim pada usaha perkebunan

b. Waktu dan Lokasi

- Kegiatan pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim dilaksanakan sejak awal April 2009 (menjelang musim kemarau) sampai dengan Desember 2009.
- Lokasi kegiatan disarankan di Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten/Kota rawan kebakaran.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi yang terdiri dari : persiapan, penyelenggaraan, monitoring dan pelaporan.

www.rajaebookgratis.com

1). Persiapan

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Perubahan Iklim perlu dipersiapkan secara matang sebelum dilaksanakannya pertemuan dimaksud, agar diperoleh hasil yang maksimal. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- Penetapan penyelenggara / Panitia Pertemuan / Rapat Koordinasi;
- Penyusunan buku panduan rapat;
- Penyiapan administrasi pertanggung jawaban (SPJ) penyelenggaraan rapat;
- Penyiapan materi rapat, berupa data dan informasi yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- Penyiapan nara sumber dan daftar yang diundang.
- Penyiapan ruang pertemuan / akomodasi dan konsumsi;
- Pengiriman undangan kepada peserta pertemuan koordinasi.

2) Penyelenggaraan

Setelah semua persiapan telah matang, serta waktu penyelenggaraan telah ditetapkan dan disepakati, maka pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dapat diselenggarakan.

Jumlah peserta dan instansi yang diundang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam pertemuan dimaksud diharapkan hadir unsur-unsur yang mewakili:

- Direktorat Jenderal Perkebunan (nara sumber)
- Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan;

www.rajaebookgratis.com

- Dinas Kabupaten yang menangani Perkebunan pada daerah rawan kebakaran;
- Pemerintah Daerah / Dinas / Instansi Terkait (Setda, Kesbanglinmas, Kehutanan, Pertanian, BPN, Bapedalda dan lain-lain),
- Pusdalkarhutla
- Kepolisian dan TNI
- Pelaku Usaha Pertanian / Perkebunan,
- LSM dan lain-lain

3). Monitoring dan Pelaporan

- **Monitoring**

Kegiatan monitoring penyelenggaran Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan bencana Alam bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan hasil kesepakatan / tindak lanjut dari Pertemuan Koordinasi yang telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring ini dilakukan oleh petugas yang membidangi pencegahan dan pengendalian kebakaran baik di Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Permasalahan yang dijumpai di dalam pertemuan koordinasi dan permasalahan di lapangan yang teridentifikasi terkait dengan tindak lanjut pertemuan perlu diinventarisir dan disusun dalam suatu daftar / matrik dan dicarikan upaya pemecahannya.

- **Pelaporan**

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengendalian

www.rajaebookgratis.com

Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim. Beberapa aspek yang perlu dilaporkan antara lain: Latar Belakang, Waktu Penyelenggaraan, Peserta Pertemuan, Materi Pertemuan, Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut. Lampirkan rumusan hasil pertemuan.

d. Indikator Kinerja

Secara umum indikator kinerja dari kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim adalah :

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), peraturan dan informasi.

- ***Outputs***

Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim pada Provinsi/Kabupaten Rawan Kebakaran.

- ***Outcomes***

Diperolehnya solusi dalam mengatasi kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim pada usaha perkebunan.

- ***Benefits***

Terkoordinir dan terkendalinya penanganan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada usaha perkebunan.

- ***Impact***

Menurunnya kasus kebakaran lahan dan kebun di Provinsi Rawan Kebakaran dan teratasinya dampak perubahan iklim pada usaha perkebunan.

www.rajaebookgratis.com

e. Komponen Biaya

Belanja Uang Honor Tidak Tetap

- Honor Presenter dan Pimpinan
- Honor Panitia

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Konsumsi dan akomodasi
- Penyusunan dan Pembahasan Laporan
- Adm, Pengiriman Surat, Foto-Copy dll
- Penggandaan Laporan
- Sewa Ruang Sidang
- Spanduk

Belanja Bahan

- ATK dan Bahan Komputer

Belanja Perjalanan Lainnya

- Dalam rangka Pelaksanaan Pertemuan

3. Fasilitasi Pemantauan Gangguan Usaha Perkebunan Tahun 2009

Perkembangan perkebunan besar yang membuka lahan secara besar-besaran dengan mengkonversi hutan tropika basah dan hutan/lahan pasang surut telah memunculkan kritik internasional yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan hidup antara lain hilangnya biodiversitas, menurunnya fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai, dan menyusutnya habitat satwa liar, terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Disamping itu terjadi pula konflik antar generasi dan konflik antara manusia dengan satwa dan fauna serta konflik antara perkebunan besar dengan masyarakat dan

www.rajaebookgratis.com

konflik antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan lainnya..

Konflik dengan masyarakat dan/atau perusahaan ini menimbulkan berbagai bentuk mulai dari konflik lahan maupun non lahan. Konflik yang terjadi dalam pengusahaan perkebunan bukan hanya membahayakan kelangsungan usaha perkebunan itu sendiri, menurunkan penerimaan nasional, dan menurunkan minat invertasi, tetapi juga yang lebih berbahaya dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Konflik dalam lingkungan perkebunan besar memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial, lingkungan dan juga internasional. Oleh karena ini, penyelesaian konflik ini menjadi sangat strategis dalam rangka pemulihan kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini.

Untuk itu perlu dilakukan fasilitasi pemantauan dalam penanganan gangguan usaha perkebunan. Tujuan kegiatan fasilitasi pemantauan gangguan usaha perkebunan adalah:

-. melakukan inventarisasi kondisi jenis gangguan usaha perkebunan yang ada di daerah;

- membantu upaya dalam penyelesaian kasus gangguan usaha perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha perkebunan;

- meningkatkan kesadaran petani/pekebun dan masyarakat dalam penanggulangan gangguan usaha perkebunan.

a. Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan metode :

www.rajaebookgratis.com

- Inventarisasi data dan informasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi di lapangan, pemantauan melalui media elektronik, media cetak serta menghubungi instansi terkait.
- Pengecekan langsung ke lapangan (ground chek) jika terjadi kasus gangguan usaha perkebunan.
- Kunjungan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat/ petani dan perusahaan perkebunan.
- Koordinasi dengan insatansi/pihak terkait antara lain melalui forum rapat, seminar dan workshop.

b. Waktu dan Lokasi

- **Waktu** pelaksanaan kegiatan ini dari Januari sampai dengan Desember tahun 2009
- **Lokasi** kegiatan fasilitasi pemantauan gangguan usaha perkebunan di daerah-daerah yang terdapat gangguan usaha perkebunan baik gangguan kasus lahan perkebunan maupun kasus non lahan.

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi sebagai berikut :

- Penyusunan **rencana kerja pelaksanaan dan inventarisasi data gangguan usaha perkebunan;**
- Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pemutakhiran data.

www.rajaebookgratis.com

- Pelaksanaan pemantauan ke daerah kasus gangguan usaha perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi/Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota mengunjungi daerah yang terjadi gangguan usaha dan yang memiliki potensi gangguan usaha perkebunan;
- Rapat/pertemuan memfasilitasi penyelesaian kasus gangguan usaha perkebunan dengan instansi terkait
- Penyusunan dan pembahasan laporan hasil rapat.
- Tindak lanjut penyelesaian kasus gangguan usaha perkebunan.
- Dinas perkebunan provinsi melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktorat Jenderal Perkebuanan, Gubernur, Bupati kasus per kasus dan menyampaikan laporan akhir tahun anggaran.

c. Indikator Kinerja

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), peraturan dan informasi.

- ***Outputs***

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemantauan Gangguan Usaha Perkebunan di provinsi yang memiliki kasus gangguan usaha perkebunan;

- ***Outcomes***

Diperoleh data perkembangan penyelesaian gangguan usaha yang ada di Provinsi yang bersangkutan;

www.rajaebookgratis.com

- ***Benefits***

Diperolehnya solusi penanganan gangguan usaha perkebunan

- ***Impact***

Pengelolaan usaha perkebunan berjalan lancar

e. Komponen Biaya

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Penyusunan dan Pembahasan Laporan
- Adm, Pengiriman Surat, Foto-Copy dll
- Penggandaan Laporan
- Biaya pulsa telp, fax, internet

Belanja Bahan

- ATK dan Bahan Komputer

Belanja Perjalanan Lainnya

- Pemantauan GUP ke Kabupaten
- Konsultasi GUP ke Pusat

Belanja Modal

Pengadaan Komputer dan Peralatannya

4. Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan

Kasus gangguan usaha terus meningkat jumlah dan kwalitasnya baik dalam bentuk penjarahan produksi, pengrusakan asset perusahaan, penyerobotan lahan dan tuntutan masyarakat terhadap lahan, kebun dan posisi pimpinan perusahaan. Dampak dari gangguan usaha ini adalah terganggunya keberlanjutan usaha perkebunan yang akan berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi serta

www.rajaebookgratis.com

gangguan keamanan masyarakat dan wilayah. Permasalahan gangguan usaha memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga dengan demikian penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan berbagai pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam upaya mencegah dan mengeliminir terjadinya kebakaran, dan penanganan gangguan usaha maka perlu diadakan Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan yang meliputi pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran kebun / lahan dan pertemuan koordinasi penyelesaian kasus gangguan usaha perkebunan.

Tujuan pertemuan koordinasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan adalah untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam upaya penanggulangan gangguan usaha perkebunan (pengendalian kebakaran dan penanganan gangguan usaha) antara instansi di Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

a. Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pertemuan koordinasi diantara pihak yang terkait dalam gangguan usaha perkebunan.

b. Waktu dan Lokasi

- Kegiatan pertemuan koordinasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan dilaksanakan sejak Januari sampai dengan Desember 2009.

www.rajaebookgratis.com

- Lokasi kegiatan disarankan di Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten/Kota rawan gangguan usaha perkebunan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari : Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan

1). Persiapan:

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan harus dipersiapkan dengan matang sebelum dilaksanakannya pertemuan dimaksud agar diperoleh hasil yang maksimal. Persiapan yang perlu dilakukan adalah:

- Penetapan Panitia Penyelenggara;
- Menyusun panduan pertemuan koordinasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- Mempersiapkan administrasi pertanggung jawaban penyelenggaraan pertemuan;
- Koordinasi dengan Dinas yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten;

2). Penyelenggaraan :

Setelah persiapan dilaksanakan secara matang, dan waktu penyelenggaraan telah disepakati, maka penyelenggaraan pertemuan / rapat dapat diselenggarakan.

- Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan;
- Waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kondisi daerah, diusahakan dalam semester I;
- Tempat pertemuan dilaksanakan di Provinsi atau di Kabupaten dengan jumlah kasus gangguan usaha perkebunan terbanyak;

www.rajaebookgratis.com

- Peserta pertemuan koordinasi antara lain :
  - Instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
  - Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
  - Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan PT Perkebunan Negara (PTPN);
  - GPP Daerah.
  - GPPI.
  - Asosiasi Petani / Masyarakat Petani Pekebun/LSM

3). Monitoring dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi diperlukan monitoring dan pelaporan. Laporan hasil peretmuan disampaikan kepada Ditjen Perkebunan, Gubernur dan Bupati yang bersangkutan.

d. Indikator Kinerja

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), peraturan dan informasi.

- ***Outputs***

Terlaksananya kegiatan Pertemuan / Rapat Koordinasi Penaggulangan Gangguan Usaha Perkebunan.

- ***Outcomes***

Diperolehnya solusi dalam mengatasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan.

- ***Benefits***

Terkoordinir dan terkendalinya penanganan gangguan usaha perkebunan.

www.rajaebookgratis.com

- ***Impact***

Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan di Provinsi dan usaha perkebunan berjalan lebih lancar dan kondusip.

e. Komponen Biaya

Belanja uang honor tidak tetap

- Honor presenter dan pimpinan
- Honor panitia

Belanja barang operasional lainnya

- Konsumsi dan akomodasi
- Penyusunan dan pembahsan laporan
- Adm, surat, dok, foto copy, dll
- Pengadaan laporan
- Sewa ruangan
- Spanduk

Bahan-bahan

- Atk dan bahan computer

Belanja perjalanan lainnya

- Dalam rangka pelaksanaan pertemuan

5. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang Undangan

Masyarakat beranggapan bahwa membuka lahan dengan membakar, maka sisa hasil bakarannya yang berupa abu bisa menjadi pupuk, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran lahan dan kebun hampir terjadi setiap tahun di Indonesia, walaupun intensitas dan luasannya tidak selalu sama. Secara langsung maupun tidak langsung, kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 1997

www.rajaebookgratis.com

mempengaruhi sector ekonomi nasional. Kerugian dalam bidang pertanian akibat kebakaran adalah menurunnya pendapatan akibat musnahnya tanaman.

Dalam rehabilitasi maupun perluasan yang dilakukan dalam pembukaan lahan di lapangan masih dilakukan dengan cara pembakaran, sehingga menyebabkan terjadi kebakaran kebun dan lahan.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang Undangan tahun 2008 dan Sosialisasi Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat petani dalam pemahaman peraturan perundang yang ada antara laian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam rangka mencegah petani untuk melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahannya.

Tujuan Sosialisasi PLTB dan Peraturan dan Perundang-Undangan adalah :

- Agar masyarakat patuh dan taat pada aturan yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 serta sanksi yang adadan patuh pada Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait.
- Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat supaya tidak buta hukum;
- Agar masyarakat dalam pembukaan lahannya tidak melakukan dengan cara membakar;
- Agar masyarakat mengetahui pemanfaatan limbah hasil bukaan lahan antara lain untuk dibuat pupuk kompos (pupuk organik) dan dari batang serta ranting dibuat arang/briket arang yang mempunyai nilai ekonomis.

www.rajaebookgratis.com

a. Metode

Kegiatan Sosialisasi PLTB dan Perturan Perundang Undangan dilaksanakan melalui forum pertemuan dan diskusi dengan masyarakat/tokoh masyarakat.

b. Waktu dan Lokasi

- Kegiatan Sosialisasi PLTB dan Perturan Perundang Undangan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2009.
- Lokasi kegiatan di daerah-daerah rawan kebakaran yang masyarakatnya belum mngetahui dan mengerti tentang PLTB dan Perturan Perundang Undangan yang berlaku.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PLTB dan Perturan Perundang Undangan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan terdiri dari : Persiapan, Penentuan lokasi dan Pelaksanaan Sosialisasi.

1). **Persiapan**.

Kegiatan Persiapan bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melakukan Sosialisasi dan siapa obyek yang akan dituju adalah sebagai berikut :

- Siapa yang akan melakukan sosialisasi dalam hal ini adalah petugas dari provinsi dan /atau kabupaten yang sudah tahu betul mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya**.**

www.rajaebookgratis.com

- Obyek yang akan dituju adalah Masyarakat petani pekebun yang berada di kecamatan rawan kebakaran.

2). Penentuan Lokasi

Kegiatan ini adalah ditentukan oleh banyaknya hotspot di tahun 2008 pada kecamatan rawan kebakaran dan lokasi yang berpotensi kebakaran.

3). Penyelenggaraan Sosialisasi.

Kegiatan penyelenggaraan osialisasi ini adalah pertemuan dan diskusi yang dilaksanakan oleh petugas Provinsi/Kabupaten untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan/desa rawan kebakaran.. Pelaksanaan Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang Undangan diadakan secara simultan kepada masyarakat petani Pekebun /ketua kelompok tani dan tokoh masyarakat yang diundang ke lokasi pelaksanaan, lama pelaksanaan yaitu 1(satu) hari penuh.

d. Indikator Kinerja

- ***Inputs***
- ***Outputs***

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang Undangan kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran;

- ***Outcomes***

Masyarakat mengetahui dan mengerti tentang pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan Peraturan Perundang Undangan yan berlaku.

www.rajaebookgratis.com

- ***Benefits***

Menurunnya kasus kebakaran lahan dan kebun di Kecamatan/desa rawan kebakaran.

- ***Impacts***

Tidak terjadinya pencemaran lingkungan dan kerugian akibat kebakaran.

e. Komponen Biaya

Belanja Uang Honor Tidak Tetap

- Honor Presenter dan Pimpinan
- Honor Panitia

Belanja Barang Operasional Lainnya

- Konsumsi
- Penyusunan dan Pembahasan Laporan
- Adm, Pengiriman Surat, Foto-Copy dll
- Penggandaan Laporan
- Perbanyakan Materi
- Pembuatan Spanduk

Belanja Bahan

- ATK dan Bahan Komputer

Belanja Perjalanan Lainnya

- Propinsi ke Kabupaten
- Kabupaten ke lokasi

www.rajaebookgratis.com

6. Pengembangan integrasi tebu dan ternak dalam Pencegahan pembakaran tanaman/daun tebu

Dalam penebangan tebu waktu panen kebiasaan petani sebelum menebang membakar tanaman tebu tersebut untuk menghilangkan daun dan kleteknya sehingga meninmbulkan asap yang akan mencemari lingkungan. Daun dan kletek tebu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dengan membakar tanaman/daun tebu asapnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kerugian ekonomis dan ekologis yang cukup berat, antara lain menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya produktivitas lahan, terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya lalu lintas darat, air dan udara. Bahkan kebakaran yang meluas dan terus menerus dapat menyebabkan timbulnya asap yang cukup tebal hingga ke lintas batas negara tetangga dan dapat mempengaruhi hubungan politik antar negara. Masalah pencemaran asap ini telah menjadi perhatian dari Negara-negara anggota ASEAN yang menghimbau untuk melakukan upaya harmonisasi dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Agar petani tidak membakar tanaman tebu yang mengakibatkan pencemaran udara, maka sebelum tebu ditebang tanamannya agar dimanfaatkan untuk pakan ternak , namun dilain pihak sebagian besar petani tebu tidak mempunyai ternak dan tidak mempunyai uang untuk membeli ternak sehingga petani perlu dibantu pengadaan ternak. Dengan adanya bantuan ternak kepada petani tebu maka pencemaran udara dapat terhindarkan dan pendapatan petani

www.rajaebookgratis.com

akan bertambah dari hasil ternak dan kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.

a. Metode

Metoda pelaksanaan dalam perawatan dan pemeliharaan ternak sapi mengacu pada metoda yang telah ada yang dikembangkan baik oleh Puslitnak dan Balitnak.
Pengadaan ternak sapi mengikuti ketentuan yang berlaku.

b. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan direncanakan mulai bulan Januari – Desember 2009 di lokasi perkebunan tebu yang berada di wilayah sentra perkebunan tebu Provinsi Lampung

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dengan cara, sebagai berikut :

- Tahapan Persiapan (melakukan survey untuk identifikasi petani peserta dan lokasi kegiatan), sarana dan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan petunjuk pelaksaan kegiatan.
- Penetapan petani dan lokasi kegiatan (berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan);
- Melakukan sosialisasi tentang kegiatan, dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten;
- Penetapan tim pengadaan barang/(ternak).
- Monitoring kegiatan yang telah dilaksanakan kelompok tani oleh Dinas Perkebunan Provinsi.
- Pelaporan kegiatan secara menyelurh

www.rajaebookgratis.com

d. Indikator Kinerja

Secara umum indikator kinerja dari kegiatan Integrasi Ternak Sapi dengan Tanaman Tebu adalah :

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), juknis dan juklak.

- ***Outputs***

Terlaksananya kegiatan Integrasi Ternak Sapi dengan Tanaman Tebu.

- ***Outcomes***

Termanfaatkannya limbah dari tanaman tebu dan tersediannya pakan ternak sapi.

- ***Benefit***

Berkurangnya kegiatan pembakaran limbah tanaman tebu yang dapat menimbulkan bencana asap dan tersedianya pakan ternak sapi yang murah.

- ***Impacts***

Berkuranngya bencana asap yang ditimbulkan dari limbah tanaman tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu, dan manarik petani lain yang belum untuk memanfaatkan limbah tebu untuk dapat meniru kegiatan yang ada .

www.rajaebookgratis.com

e Komponen Biaya

Pengembangan Ternak Tebu

Belanja Bahan

- Bibit ternak sapi
- Kandang
- Obat-obatan/Pakan

Belanja Operasional

- Insentif Tenaga Kerja

Pengawalan Kegiatan

Belanja Operasional

- ATK
- Foto Copy, Pengiriman Surat
- Penyusunan Laporan
- Penggandaan Laporan

Belanja Perjalanan

- Perjalanan ke Kab./Prov.
- Perjalanan ke Lokasi

7. Pengadaan peralatan Pembukaan lahan Tanpa Bakar/ Tacktor-*mulcher*

Dalam pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan masih dijumpai dilakukan dengan cara pembakaran, sehingga menyebabkan terjadi kebakaran kebun dan lahan. Masyarakat beranggapan bahwa dengan membuka lahan dengan cara membakar disamping biayanya murah dan mudah dalam pelaksanaannya, dari sisa hasil bakarannya

www.rajaebookgratis.com

yang berupa abu dapat menjadi pupuk. Dengan anggapan seperti itu maka banyak masyarakat pekebun yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran Kebakaran kebun dan lahan yang hampir terjadi setiap tahun walaupun intensitas dan luasannya tidak selalu sama telah menimbulkan dampak negatif terhadap kerugian ekonomis dan ekologis yang cukup berat. antara lain menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya produktivitas lahan, terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya lalu lintas darat, air dan udara. Terkait dengan penugasan Departemen Pertanian dalam koordinasi tingkat nasional agar Deptan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam pencegahan atau tindakan preventif kebakaran lahan, dan dengan melihat kondisi ekonomi petani yang tidak mampu untuk membayar kontraktor dalam membuka lahannya maka salah satu upaya pencegahan kebakaran dilakukan dengan membantu petani menyediakaan peralatan pembukaan lahan sehingga petani dapat membuka lahannya dengan cara tidak dibakar

Tujuan kegiatan ini adalah (1) Membantu dan mempermudah untuk kegiatan pembukaan pada areal hutan sekunder (2) mempermudah dalam mengumpulkan dan memanfaatkan hasil bukaan lahan yang telah dilakukan dikarenakan telah

www.rajaebookgratis.com

tercacah dan (3) meningkatkan pendapatan petani karena efisiensi kegiatan pembukaan lahan dan dari pemanfaatan limbah bukaan lahan.

a. Metoda

Pengadaan peralatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)/tractor-mulcher dilaksanakan dengan tender sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Waktu dan Lokasi

- Pengadaan peralatan pembukaan lahan (PLTB)/tractor-*mulcher* diusahakan dilaksanakan semester I tahun 2009.
- Lokasi kegiatan diprioritaskan di Kabupaten rawan kebakaran lahan dan kebun pada Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, pada tahap awal dilaksanakan pada areal yang mudah terjangkau dan kondisi areal tersebut memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan mekanisasi tersebut.

c. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dengan tahapan sebagai berikut :

- Pengumpulan informasi spesifikasi peralatan PLTB /traktor-*mulcher*.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Dinas Perkebunan Provinsi selaku penanggung jawab, menyusun petunjuk pelaksanaan operasional peralatan PLTB/ traktor-*mulcher* yang antara lain :

www.rajaebookgratis.com

- Membentuk tim operasional
- Menyusun peta rencana areal kegiatan pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan di lapangan
- Pembukuaan keuangan operasional peralatan PLTB
- Monitoring dan Pembinaan di lapangan

o Monitoring Data/Informasi

- Pemantauan Kegiatan.
  - ➢ Luas areal dan jumlah petani yang telah melaksanakan kegiatan dan waktu operasional dari pemanfaatan peralatan PLTB tersebut.
  - ➢ Jadwal pemeliharaan dan perawatan peralatan PLTB.

o Pelaporan

Laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan

d. Indikator Kinerja

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), peraturan dan informasi.

- ***Outputs***

Tersediannya peralatan tanpa bakar (PLTB) / *mulcer* untuk masyarakat.

www.rajaebookgratis.com

- ***Outcomes***

Terbantunya masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan dimanfaatkanya limbah bukaan lahan

- ***Benefit***

Diperolehnya effisiensi biaya dari pembukaan lahan dan pemanfaatan limbah bukaan yang keuntungannya dapat dirasakan langsung oleh petani.

- ***Impacts***

Meningkatnya pendapatan dari petani dan tidak terjadi pembukaan lahan dengan pembakaran yang dapat mencemarkan udara.

e. Komponen Biaya

Alat pembukaan lahan tanpa bakar/ Mulcher
1 unit

8. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global Pada subsektor perkebunan

Perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian karena yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim berupa peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, dan peningkatan frekuensi terjadinya iklim ekstrim akan berpengaruh langsung pada sistem produksi pertanian.

Perubahan pola hujan dan pergeseran musim diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak hujan pada musim penghujan dan semakin sedikit di musim kemarau. Hujan

www.rajaebookgratis.com

yang berlebihan sangat mungkin akan meningkatkan erosi, pencucian hara dan tanah longsor. Apabila air yang berlebih tidak dapat diserap oleh tanah di hulu akan meningkatkan aliran permukaan yang akhirnya menyebabkan banjir. Sebaliknya musim kemarau yang kering akan menyebabkan cekaman air sehingga kekeringan juga makin sering terjadi. Perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan kejadian iklim ekstrim atau anomali ikllim, akan menimbulkan resiko yang cukup besar bagi sektor pertanian, termasuk sub sektor perkebunan. Oleh karena itu diperlukan strategi nasional yang terdiri atas antisipasi, mitigasi dan adaptasi di bidang pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dimaksud.

Mitigasi merupakan upaya mengurangi sumber maupun peningkatan penyerapan gas rumah kaca, sedangkan Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Kegiatan mitigasi dan adaptasi pada sub sektor perkebunan perlu dilaksanakan agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Subsektor Perkebunan adalah :

1) Memantau terjadinya perubahan iklim dengan memantau data iklim yang dapat diakses dari internet serta menyebarluaskan informasi data iklim yang terjadi ke daerah;
2) Melakukan Sosialisasi dan memantau persiapan daerah terhadap antisipasi anomali iklim;

www.rajaebookgratis.com

3) Melakukan pembangunan rintisan model adaptasi kekeringan pada daerah rawan kekeringan
4) Menyusun buku pedoman umum adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (budidaya perkebunan pada lahan pegunungan, teknologi konservasi lahan dan air, serta teknologi pengendalian longsor);
5) Menyusun laporan penanganan mitigasi dan adaptasi subsektor perkebunan.

a. Metode

Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global Pada subsektor perkebunan dilakukan dengan 2 metode :

- Adaptasi dengan pembangunan demplot sebagai percontohan penanggulangan kekeringan pada lahan perkebuan.
- Melakukan sosialisasi tentang perubahan iklim global dan dampaknya terhadap perkebunan melalui forum pertemuan dan diskusi.

b. Waktu dan Lokasi

- Kegiatan dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 pda lokasi daerah-daerah rawan kekeringan.

c. Pelaksanaan

1) Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan data, informasi dan upaya pencegahan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim yang telah dilakukan oleh daerah dan permasalahan yang dihadapi;

www.rajaebookgratis.com

2) Melakukan pembangunan rintisan model adaptasi kekeringan pada daerah-daerah rawan kekeringan. (Juknis rintisan model terlampir).
3) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan rintisan model kekeringan di lokasi.
4) Menyusun bahan/materi untuk sosialisasi Perubahan Iklim Global dan Pengaruhnya terhadap usaha perkebunan.
5) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6) Pembuatan laporan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada subsektor perkebunan

Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada subsektor perkebunan dilaksanakan di provinsi/daerah rawan kekeringan

d. Indikator Kinerja

- ***Inputs***

Tersedianya dengan cukup dana, sumber daya manusia (SDM), juknis, peraturan dan informasi.

- ***Outputs***

Terlaksananya pembangunan rintisan model penanggulangan kekeringan pada lahan perkebunan dan tersosialisasikannya perubahan iklim global dan dampaknya pada usaha perkebunan.

- ***Outcomes***

Masyarakat dan petugas dapat ilmu dan keterampilan sehingga mengetahui dan mengerti tentang perubahan iklim global dan pengaruhnya terhadap usaha perkebunan.

www.rajaebookgratis.com

- ***Benefits***

Masyarakat dan petugas dapat menerapkan tentang cara mengatasi perubahan iklim global dan pengaruhnya terhadap usaha perkebunan.

- ***Impacts***

Usaha perkebunan dapat terhindar dari dampak negatip perubahan iklim global

e. Komponen biaya

Belanja uang honor tidak tetap

- Upah tenaga kerja untuk pembuatan demplot

Belanja Bahan

- Pupuk kandang/pupuk hijau, pupuk organik (Urea, SP 36 dan KCL) mulasa dan rumput gajah
- Pralatan (botol plastik, cangkul, sabit, bumbung, pompa air, tali rafiah, label dan meteran)

Belanja Barang Non Operasional Laniinya

- Penyusunan dan pembahsan laporan
- Pengiriman surat, dok, foto copy, dll
- Penggandaan laporan

Belanja Perjalanan Lainnya

- Perjalanan persiapan provinsi ke lokasi
- Perjalanan pemantauan dan evaluasi provinsi ke lokasi
- Perjalanan pemantauan dan evaluasi kabupaten ke lokasi

www.rajaebookgratis.com

IV. ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kegiatan, maka pelaksanaannya perlu diorganisasikan agar setiap tingkatan instansi yang terkait baik di Pusat maupun Daerah mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

A. DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan bertugas untuk :

1. Menyiapkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Kegiatan yang memuat tentang norma, standar, kriteria dan prosedur kegiatan yang dilaksanakan untuk disampaikan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pengawalan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara reguler untuk disampaikan kepada Dirjen Perkebunan.

B. BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP)

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BP2TP) bertugas untuk :

www.rajaebookgratis.com

1. Menyiapkan rekomendasi teknologi pengendalian OPT kepada petugas Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Memberikan bimbingan teknis kepada petugas Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan teknologi dan bimbingan teknis kepada petani;
3. Menyiapkan metode evaluasi pelaksanaan pengendalian OPT.

C. DINAS PROVINSI YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN

Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan bertugas untuk :

1. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Kegiatan yang disusun oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan;
2. Menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada Dinas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan;
3. Bagi Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan yang melaksanakan secara langsung kegiatan Tugas Pembantuan wajib membuat Petunjuk Teknis kegiatan;
4. Melakukan bimbingan teknis dan pengawalan pelaksanaan kegiatan;
5. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk disampaikan kepada Gubernur dan Dirjen Perkebunan.

www.rajaebookgratis.com

D. DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN

Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan bertugas untuk :

1. Menyiapkan Petunjuk Teknis Kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis yang disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, survei CP/CL, pengadaan bahan dan alat;
3. Melakukan pendampingan petani berupa bimbingan teknis dan pengawalan pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Dirjen Perkebunan.

E. INSTANSI TERKAIT

Instansi yang mungkin terkait dengan persiapan/pelaksanaan kegiatan adalah Pusat/Balai Penelitian Perkebunan dan Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat bertugas untuk :

1. Memberi pelayanan konsultasi teknologi pengendalian OPT kepada petugas Direktorat Perlindungan Perkebunan, BBP2TP dan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Memberi rekomendasi teknologi pengendalian OPT dan teknik aplikasinya di lapangan;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi hasil pengendalian OPT.

www.rajaebookgratis.com

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Monitoring ditujukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan.

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kapubaten/kota. Pelaksanaan monitoring selama kegiatan berlangsung dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan.

B. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan untuk mengikuti ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dengan yang direncanakan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi disusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan dilakukan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kapubaten/kota.

C. PELAPORAN

Pelaporan diperlukan sebagai dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang dilkasanakan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi. Juga disertakan saran-saran yang perlu dilaksanakan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang. Di dalam laporan antara lain termuat data dan informasi yang terinci tentang perkembangan fisik dan keuangan.

Laporan dari kegiatan yang dibebankan pada dana Tugas Pembantuan (TP), dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan ke Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian diteruskan ke Dinas yang membidangi

www.rajaebookgratis.com

Perkebunan Provinsi. Selanjutnya diteruskan ke Direktorat Perlindungan Perkebunan.
Laporan kegiatan dengan dana Dekon dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan ke Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Selanjutnya diteruskan ke Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Jenis Laporan :

1). Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2). Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan, paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

3). Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan, keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegitan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dibuat segera setelah kegiatan selesai dan disampaikan ke Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 2010.

Untuk mempermudah pembuatan laporan akhir, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pada LL, LUPH dan UPPT dibuat dengan format sebagai berikut :

www.rajaebookgratis.com

I. Pendahuluan
   1.1. Latar belakang
   1.2. Tujuan
   1.3. Sasaran
   1.4. Sumber Pembiayaan
II. Pelaksanaan
   2.1. Waktu dan Tempat
   2.2. Pelaksana
   2.3. Metoda
III. Hasil dan Pembahasan
IV. Kesimpulan dan Saran
V. Penutup

.

www.rajaebookgratis.com

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan perlindungan perkebunan di daerah sebagian didanai dengan APBN-Tugas Pembantuan (TP) yang dialokasikan dalam DIPA-TP Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang perkebunan tahun anggaran 2009. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan di daerah tahun anggaran 2009 diperlukan kontribusi dari sumber dana lain seperti APBD I, APBD II dan swadaya petani.